



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2289 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan formulir-formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2289 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI REMBANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rembang secara langsung dan demokratis.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 merupakan salah satu tahapan yang krusial. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Kabupaten Rembang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Pedoman Teknis ini sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini sebagai berikut :

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; dan
3. Agar tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;
2. Penyampaian Dan Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten;
5. Penetapan Hasil Pemilihan dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang;
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih;
8. Perselisihan Hasil Pemilihan;
9. Penggunaan Teknologi Sistem Informasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

E. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Rembang untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

6. KPU Kabupaten Rembang adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
13. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Rembang.

14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rembang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
15. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.
16. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon bupati dan wakil bupati.
17. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang Tahun 20204.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
19. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
20. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Rembang atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Hari adalah hari kalender.

F. Asas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan

1. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten.
4. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan oleh:
 - a. PPK pada tingkat kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati;
 - b. KPU Kabupaten Rembang pada tingkat kabupaten untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati.

BAB II

TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

1. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan meliputi:
 - a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - c. penetapan hasil Pemilihan; dan
 - d. penetapan Pasangan Calon terpilih.
2. Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyelesaian keberatan.
4. Penetapan hasil Pemilihan meliputi penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati.
5. Penetapan Pasangan Calon terpilih meliputi penetapan Pasangan Calon terpilih pemilihan bupati dan wakil bupati.
6. Kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
7. Program dan jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB III
PENYAMPAIAN DAN PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA

1. PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel.
3. PPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK disertai surat pengantar.
4. PPS wajib:
 - a. mengumumkan formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI,dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari;
 - b. menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan penghitungan suara dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
5. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.
6. PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati.
7. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS.

8. PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
9. PPK tidak diperbolehkan membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS.
10. PPK hanya diperkenankan membuka kotak suara tersegel untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan atau kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

1. PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
2. Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
 - b. pembagian tugas; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana.
3. PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
4. Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
5. PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
6. Surat undangan paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
7. PPK harus menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
8. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, ketua PPS, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
9. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. anggota PPK dibantu Ketua PPS dan anggota PPS bertugas menyiapkan data hasil penghitungan perolehan suara dan membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara; dan

- c. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas:
 - 1) menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS; dan
 - 2) membantu proses rekapitulasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
10. PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai.
11. Sarana dan prasarana terdiri atas:
 - a. ruang rapat dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel;
 - b. alat bantu rekapitulasi;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. kotak rekapitulasi yang digunakan untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
 - e. kotak hasil TPS yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan suara dari setiap TPS di wilayah kerja PPK untuk setiap jenis Pemilihan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai; dan
 - f. sarana lainnya yang terdiri atas:
 - 1) sampul kertas;
 - 2) segel;
 - 3) spidol;
 - 4) bolpoin;
 - 5) lem perekat;
 - 6) alat tulis kantor lainnya;
 - 7) gembok atau alat pengaman lainnya; dan
 - 8) komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

1. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.

2. Dalam hal masih terdapat kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum tiba di kecamatan karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai, PPK dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dari desa/kelurahan yang telah lengkap kotak suara tersegel dari seluruh TPS di desa/kelurahan yang menjadi wilayah kerja PPK.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
4. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
5. Saksi harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
6. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
7. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait serta diliput oleh pewarta.
8. Pemantau Pemilihan dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK.
9. Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan.
10. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

11. Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.
12. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
13. PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi.
14. Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
15. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan sampai seluruh desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
16. Rekapitulasi dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati.
17. PPK melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut;
 - a. membuka kotak suara tersegel;
 - b. mengeluarkan masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI; dan
 - 3) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,dari kotak suara tersegel;
 - c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI,pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi;
 - d. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;

- e. dalam membacakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, PPK dapat meminta bantuan PPS;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPS membacakan data dalam formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
 - i. mencocokkan data dalam formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - j. mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; atau
 - 2) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI, yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - k. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
18. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK.
19. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
20. Formulir:
- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
 - c. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

- d. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - e. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI,
sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.
21. Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
 22. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf i dan huruf j, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI,
dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
 23. Dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
 24. PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 25. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
 26. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bersamaan.
 27. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel, ketua PPK membuka dan memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
 28. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 29. Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya, PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di wilayah kabupaten.
 30. Rapat pleno rekapitulasi dapat dilaksanakan di kabupaten wilayah PPK berada atau tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Rembang.

31. Rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
32. Rapat pleno rekapitulasi dapat diliput oleh wartawan.
33. Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di kabupaten ditetapkan dengan Keputusan KPU.
34. PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
35. PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 34 dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
36. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir angka 34 sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
37. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir yang telah dibetulkan.
38. Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
39. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
40. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
41. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
42. Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir.
43. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

44. Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir wajib mencantumkan alasan.
45. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
46. PPK menyerahkan formulir yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan,
yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
47. Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir dapat diperoleh dari PPK.
48. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,
yang telah ditandatangani.
49. PPK mengunggah hasil pindai formulir sebagaimana dimaksud pada angka 48 sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.
50. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
51. Hasil dokumentasi dapat berupa foto atau video.
52. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memasukkan:
 - a. formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,
yang telah ditandatangani masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
 - b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
 - c. daftar hadir dan tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.

53. PPK memasukkan sampul kertas tersegel ke dalam kotak rekapitulasi dan memasang gembok atau alat pengaman lainnya.
54. PPK memasukkan seluruh formulir penghitungan suara di TPS ke dalam kotak hasil TPS dan memasang gembok atau alat pengaman lainnya dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir MODEL C.HASIL KWK-GUBERNUR dan formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:
 - 1) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - 2) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK- GUBERNUR yang dimasukkan ke dalam kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali; dan
 - b. 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, serta formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:
 - 1) formulir Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) formulir Daftar Pemilih Pindahan;
 - 3) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP- KWK;
 - 4) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - 5) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - 6) Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - 7) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;
 - 8) MODEL C.PENDAMPING-KWK;
 - 9) tanda terima;
 - 10) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi;
 - 11) formulir Pindah Memilih; dan
 - 12) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK- BUPATI, atau formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA yang dimasukkan ke dalam kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
55. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.

56. Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.
57. PPK wajib menyerahkan:
 - a. kotak suara tersegel Pemilihan:
 - 1) gubernur dan wakil gubernur; dan
 - 2) bupati dan wakil bupati;
 - b. kotak rekapitulasi tersegel; dan
 - c. kotak hasil TPS tersegel,kepada KPU Kabupaten Rembang.
58. Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada angka 57 disertai dengan surat pengantar.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.
4. Penyelesaian keberatan memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
5. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.
6. PPK wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
7. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.

8. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN

Bagian Kesatu

Persiapan

1. KPU Kabupaten Rembang menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka 57 dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
2. KPU Kabupaten Rembang wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak.
3. KPU Kabupaten Rembang tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.
4. KPU Kabupaten Rembang mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.
5. Persiapan pelaksanaan rekapitulasi meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana.
6. KPU Kabupaten Rembang melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Rembang.
7. Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
8. KPU Kabupaten Rembang membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
9. Surat undangan paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
10. KPU Kabupaten Rembang harus menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

11. KPU Kabupaten Rembang melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dimulai.
12. Sarana dan prasarana terdiri atas:
 - a. ruang rapat dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak tersegel;
 - b. alat bantu rekapitulasi;
 - c. kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan; dan
 - d. sarana lainnya yang terdiri atas:
 - 1) sampul kertas;
 - 2) segel;
 - 3) spidol;
 - 4) bolpoin;
 - 5) lem perekat;
 - 6) alat tulis kantor lainnya; dan
 - 7) komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

1. KPU Kabupaten Rembang melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam BAB V angka 1 dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
2. Dalam hal masih terdapat kotak yang belum tiba di KPU Kabupaten karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten Rembang dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.

4. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. PPK.
5. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
6. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
7. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
8. Pemantau Pemilihan dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten.
9. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
10. KPU Kabupaten Rembang melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.
11. KPU Kabupaten Rembang dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi.
12. Ketua KPU Kabupaten Rembang memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.

13. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Rembang.
14. Rekapitulasi dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati.
15. KPU Kabupaten Rembang melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel;
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
 - 3) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA; dan
 - 3) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - d. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, KPU Kabupaten Rembang dapat meminta bantuan PPK;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Rembang menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:

- 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. Mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten untuk mencocokkan data dalam formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - j. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.
16. KPU Kabupaten Rembang wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
17. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten Rembang mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
18. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, KPU Kabupaten Rembang menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, sebagai dasar melakukan pembetulan.
19. KPU Kabupaten Rembang menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
20. KPU Kabupaten Rembang mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

21. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten Rembang mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 19 sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten untuk ditandatangani.
22. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan terdapat kesalahan, KPU Kabupaten Rembang melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir yang telah dibetulkan.
23. Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
24. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten Rembang menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten untuk ditandatangani.
25. Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
26. Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
27. Seluruh anggota KPU Kabupaten Rembang dan Saksi yang hadir menandatangani formulir.
28. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Rembang dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Rembang dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
29. Anggota KPU Kabupaten Rembang dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28 wajib mencantumkan alasan.
30. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Rembang dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir, KPU Kabupaten Rembang mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK.
31. KPU Kabupaten Rembang menyerahkan formulir yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten,

yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

32. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 dapat diperoleh dari KPU Kabupaten Rembang.
33. KPU Kabupaten Rembang melakukan pemindaian terhadap formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA,yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024.
34. KPU Kabupaten Rembang mengunggah hasil pindai formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf b sebagai bahan publikasi.
35. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten Rembang memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
36. Hasil dokumentasi dapat berupa foto atau video.
37. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten Rembang memasukkan:
 - a. formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA,yang telah ditandatangani masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
38. KPU Kabupaten Rembang memasukkan kembali seluruh formulir yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten ke dalam kotak rekapitulasi.

39. KPU Kabupaten Rembang menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
40. KPU Kabupaten Rembang tidak diperbolehkan membuka kotak tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 39 dan mengeluarkan isinya kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.
41. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
42. Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Rembang selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten Rembang.
43. KPU Kabupaten Rembang wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024.
44. Penyerahan sampul kertas tersegel disertai dengan surat pengantar.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten kepada KPU Kabupaten Rembang, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten Rembang wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten dapat diterima, KPU Kabupaten Rembang harus segera melakukan pembetulan.

4. Penyelesaian keberatan memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
5. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten Rembang meminta pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten yang hadir.
6. KPU Kabupaten Rembang wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
7. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten, KPU Kabupaten Rembang mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
8. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK dengan kata nihil.

-

BAB VI

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Hasil Pemilihan

1. KPU Kabupaten Rembang menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati.
2. KPU Kabupaten Rembang melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan melakukan pengunggahan.
3. Pemindaian Keputusan KPU Kabupaten Rembang dilakukan pada Hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
4. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Rembang pada Hari yang sama.

Bagian Kedua

Penetapan Pasangan Calon Terpilih

1. Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Kabupaten Rembang melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
 - b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
2. Dalam hal dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati; dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Waktu pelaksanaan penetapan Pasangan Calon terpilih ditetapkan lebih

lanjut oleh KPU.

4. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih merata penyebarannya.
6. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih.
7. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh desa/kelurahan di kabupaten Rembang tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih.
8. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh TPS di Kabupaten Rembang tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih.
9. KPU Kabupaten Rembang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. pasangan calon bupati dan wakil bupati;
 - b. partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten.
10. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih.
11. Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
12. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. DPRD kabupaten;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;

- d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten.
13. KPU Kabupaten Rembang melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan melakukan pengunggahan.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK atau KPU Kabupaten Rembang, dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
 - 1) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Saksi Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten.

3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi.
4. Dalam hal terjadi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.

-

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kepada DPRD kabupaten.
2. Penyampaian dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat calon bupati dan wakil bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan, Kabupaten Rembang menyampaikan pemberitahuan kepada menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri atau gubernur.
4. Dalam hal terdapat pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang melanggar ketentuan mengenai dana kampanye Pemilihan, Pasangan Calon tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan.
5. Dalam hal sampai dengan pengusulan pelantikan, terdapat:
 - a. salah satu calon dari Pasangan Calon terpilih; atau
 - b. Pasangan Calon terpilih,yang berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, KPU Kabupaten Rembang mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB IX PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

1. Perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. KPU Kabupaten Rembang dapat membuka kotak suara, kotak hasil TPS, dan/atau kotak rekapitulasi untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan.
3. Pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS, dan/atau kotak rekapitulasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Saksi, dan Pemantau Pemilihan, serta diliput oleh pewarta dalam pelaksanaan pembukaan kotak;
 - b. mengeluarkan dokumen atau formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;
 - c. menggandakan dokumen atau formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara, kotak suara hasil TPS dan/atau kotak rekapitulasi dan disegel seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten.

BAB X

PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

1. KPU Kabupaten Rembang dan PPK dalam menggunakan alat bantu rekapitulasi dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
2. KPU Kabupaten Rembang memberikan akses pembacaan data dalam alat bantu rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang sebagai panduan dan pedoman untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 2289 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
 HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	Kamis, 28 November 2024	Sabtu, 30 November 2024
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	Kamis, 28 November 2024	Selasa, 3 Desember 2024
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	Kamis, 28 November 2024	Senin, 9 Desember 2024
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	Kamis, 28 November 2024	Selasa, 3 Desember 2024
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara: a. tingkat kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Jumat, 29 November 2024	Jumat, 6 Desember 2024
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten dan melalui laman resmi KPU Kabupaten	Jumat, 29 November 2024	Kamis, 12 Desember 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumat, 29 November 2024	Jumat, 6 Desember 2024
8	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2289 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL D.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN
SAKSI-KWK
Lembar 1 dari 2 halaman

Rekapitulasi Tingkat : Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

Kecamatan/Distrik*) :

.....

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Jenis Pemilihan : Gubernur dan Wakil Gubernur

Bupati dan Wakil Bupati

Walikota dan Wakil Walikota**)

Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi *) sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi *) sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....,
.....
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
SAKSI

.....,
.....
PPK/KPU KABUPATEN/KOTA/PROVINSI *)
.....

.....,

KETUA,

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Centang (☐) salah satu
- Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi*);
- Apabila terdapat *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi;
- Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat dengan kalimat NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi.

FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

MODEL D.HASIL KECAMATAN- KWK-GUBERNUR Halaman 1
--

KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan/ *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil
 penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau nama lain.

Kecamatan/ *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan atau nama lain.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN /*)

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0
		PR	0
		JML	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0
		PR	0
		JML	0

NO.	URAIAN		JUMLAH
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0

NO.	URAIAN		JUMLAH
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	0
		JML	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 - 2

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN /*)

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN		
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A. DATA PEMILIH																				
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																		0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap			0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan			0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			0															0

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

O.	URAIAN	RINCIAN															
V.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0

O.	URAIAN	RINCIAN															
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *)
 KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI

: [KECAMATAN]
 : [KABUPATEN/KOTA]
 : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
 KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN			RINCIAN															
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap			0														0	
2	Jumlah surat suara yang digunakan			0														0	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0														0	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			0														0	

NO.	URAIAN			RINCIAN															
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0	
		PR	0															0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024**

MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK- GUBERNUR Halaman 1
--

KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari initanggal bulan tahun dua ribu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan/ *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau nama lain.

Kecamatan/ *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan atau nama lain.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / *)

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0
		PR	0
		JML	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
2.	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
3.	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0
		PR	0
		JML	0

NO.	URAIAN		JUMLAH
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0

NO.	URAIAN		JUMLAH
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	0
		JML	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 - 2

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN /*)

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA KOLOM KOSONG	
1	2	3
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
2	KOLOM KOSONG	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
 KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN /*) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/.....*) :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	KOLOM KOSONG																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *)
 KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI

: [KECAMATAN]
 : [KABUPATEN/KOTA]
 : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN		RINCIAN																
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0															0	
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
		PR	0															0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
		PR	0															0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

No	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0														0	
2	KOLOM KOSONG	0														0	

No	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0														0	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
 KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR		
	I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 GUBERNUR
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA KOLOM KOSONG																	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	KOLOM KOSONG	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2024

MODEL
D.HASIL KECAMATAN-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 1

KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan/ *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI/C.HASIL-KWK-WALIKOTA *) dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau nama lain.

Kecamatan/ *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan atau nama lain.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / *)

NO.	URAIAN	JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A.	DATA PEMILIH	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK PR JML 0 0 0
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML 0 0 0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML 0 0 0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML 0 0 0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK PR JML 0 0 0

NO.	URAIAN	JUMLAH
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML 0 0 0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 - 2

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / *)

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
1	2	3
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
4	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
5	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
6	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....



KECAMATAN /*) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
 KELURAHAN/.....*) :

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																		0

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN /*) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
4	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
5	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
6	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN			RINCIAN																
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap			0														0
2	Jumlah surat suara yang digunakan			0														0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0														0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			0														0

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

No	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
4	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
5	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
6	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0

No	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
 KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																	
1																		
A.	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1																		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap			0														0
2	Jumlah surat suara yang digunakan			0														0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0														0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			0														0

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS																	
1																		
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

O.	URAIAN	RINCIAN																
V.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																		
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
4	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
5	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
6	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0

O.	URAIAN	RINCIAN																
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0																
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

MODEL
D.HASIL KECAMATAN-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 1

KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
KABUPATEN/KOT : [KABUPATEN/KOTA]
A PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari initanggal bulan tahun dua ribu..... ,
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan/ *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di:
.....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI/C.HASIL-KWK-WALIKOTA *) dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau nama lain.

Kecamatan/ *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan atau nama lain.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA :
 [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / *)

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0
		PR	0
		JML	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0
		PR	0
		JML	0

NO.	URAIAN		JUMLAH
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0

NO.	URAIAN		JUMLAH
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	0
		JML	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 - 2

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / *)

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG	
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
2	KOLOM KOSONG	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KECAMATAN /*) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
 KELURAHAN/.....*) :

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN		
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A. DATA PEMILIH																				
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																			
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>)																		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																		0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III. DATA PEMILIH DISABILITAS																			
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN /*) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/*) :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																
2	KOLOM KOSONG																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *)
 KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI

: [KECAMATAN]
 : [KABUPATEN/KOTA]
 : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN			RINCIAN																
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap			0														0
2	Jumlah surat suara yang digunakan			0														0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>)			0														0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			0														0

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / *)
 KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI

: [KECAMATAN]
 : [KABUPATEN/KOTA]
 : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA Halaman 2
 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG																	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
2	KOLOM KOSONG	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / *) : [KECAMATAN]
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

NO.	URAIAN			RINCIAN																
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap			0														0
2	Jumlah surat suara yang digunakan			0														0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>)			0														0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			0														0

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / *)
 KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI

: [KECAMATAN]
 : [KABUPATEN/KOTA]
 : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... *) :

URAIAN		RINCIAN																
DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																		
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
2	KOLOM KOSONG	0																0

URAIAN		RINCIAN															
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		JUMLAH PINDAHAN	TPS '4	TPS '5	TPS '6	TPS '7	TPS '8	TPS '9	TPS '10	TPS '11	TPS '12	TPS '13	TPS '14	TPS '15	TPS '16	TPS '17	JUMLAH AKHIR
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Format Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- BUPATI/WALIKOTA dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon



FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

MODEL D.HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																	0
		LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 2 - 1 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS																	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 2 - 2 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dapat disesuaikan berdasarkan jumlah pasangan calon



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

MODEL
D.HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau
Pemilihan, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat
kabupaten/kota *) berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada *) kejadian khusus
dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota
*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC			
1			
A.	DATA PEMILIH																					
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																			0	
		PR																				0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																					
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																				0
		PR																				0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																				0
		PR																				0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																				0
		PR																				0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC			
1			
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																				0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																				0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>)																				0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																				0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC			
1			
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																			0	
		PR																				0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA KOLOM KOSONG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																		
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																	0
2	KOLOM KOSONG																	0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA									
1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 2 - 1 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN																
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap	0																0
2	Jumlah surat suara yang digunakan	0																0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	0																0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	0																0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
GUBERNUR
Halaman 2 - 2 Lembar ...

O.	URAIAN	RINCIAN																
V.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA KOLOM KOSONG	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																		
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0																0
2	KOLOM KOSONG	0																0

O.	URAIAN	RINCIAN																
.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA									
1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Format Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon



FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2024

MODEL
D.HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari initanggal bulan tahun dua ribu,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) bertempat di:
.....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir
MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus
dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi
Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																	
A.	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>)																	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS																	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 2 - 2 Lembar 1

O.	URAIAN	RINCIAN															
V.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0

O.	URAIAN	RINCIAN															
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 2 - 1 Lembar ...

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS																	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 2 - 2 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA dapat disesuaikan berdasarkan jumlah
pasangan calon



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2024**

MODEL
D.HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari initanggal bulan tahun dua ribu....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG																	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WALIKOTA																0
2	KOLOM KOSONG																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 2 - 1 Lembar ...

URAIAN			RINCIAN																
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH																			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK		0																0
	PR		0																0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK		0																0
	PR		0																0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		0																0
	PR		0																0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		0																0
	PR		0																0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

URAIAN			RINCIAN															
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK		0															0
	PR		0															0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]
: [PROVINSI]

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA
Halaman 2 - 2 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WALIKOTA	0															0
2	KOLOM KOSONG	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon

*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Andreyan Harsono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI